

# **PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2019 — 2024**

**Amarudin<sup>1</sup>, LISA EFRINA<sup>2</sup>, AYU ARISTIKA<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

<sup>2</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

<sup>3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

**Email; amarajja14@gmail.com**

## **Abstract**

Poverty is a problem faced by all countries, both developed and developing countries, because the conditions of development and empowerment of their communities are still not stable and sustainable. The government has made various efforts to overcome the problem of poverty, namely by launching poverty alleviation and community empowerment programs including village fund programs and village fund allocations. The aim of this research is to find out whether Village Funds and village fund allocations have an effect on poverty in the District. Rimbo Ulu. This research uses quantitative methods and the type of data used is secondary data taken from 6 Main Village Offices in Rimbo Ulu District. The type of data used is panel data, namely 2019-2024. The collected data was analyzed using the classic assumption test and multiple linear regression analysis with village funds (X1), village fund allocation (X2) and poverty (Y). The results of this research show that together research on village funds and the allocation of village funds on poverty levels does not have a significant effect on poverty in Rimbo Ulu District, 53%, while the remaining 47% is influenced by other variables that are not included in the research variables. in its implementation it is not in accordance with the basic values of Islamic Economics, namely justice and responsibility.

**Keywords:** : Village Funds, Village Fund Allocation, Poverty

This is an open access article under the CC BY-SA license.



## **Pendahuluan**

Pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi(Warisno, 2021). Pencapaian

cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat(Yusma Lukman Yasin, Muslihun, 2019).

Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar penghasilan seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi dan lain-lain(Jusmaliani, 2023). Menurut Suharto, adapun penyebab kemiskinan paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakuan(Ummah, 2019).

Ketiga, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya., seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi, orang menjadi miskin akibat di miskinakan oleh sistem yang ada Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Poverty mendeklarasikan

bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi (Ferdiyono & Santoso, 2018). Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam dan konflik sosial.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang di namainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah "yang bergerak" (Johan Nasution, 2014).

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Dan mereka itulah

orang-orang yang beruntung. Melalui pemberian dan pengorbanan, dalam lingkup terbatas, kerabat akan tercukupi kebutuhannya, dan dalam lingkup yang lebih luas, perbuatan itu akan melahirkan sikap tolong-menolong di antara sesama muslim. Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan suatu kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan menumbuhkan nilai kemiskinan dan kesejahteraan hidupnya bermayoritas dengan cara bertani. Sekarang Kecamatan Sendang Agung memiliki penduduk yang sekarang dipimpin oleh seorang Camat yakni Joko Kisworo (Johan Nasution, 2014).

Menurut data yang telah diambil menunjukkan bahwa tingkat Kemiskinan di Sendang Agung masih terbilang semakin meningkat sedangkan dana desa dan pengalokasian alokasi dana desa sudah terlaksana, data dari 5 tahun terakhir yang menunjukkan jumlah keluarga kurang mampu dari tahun 2019 s.d 2024 masih fluktuatif. Sehubungan dengan hal tersebut pemberdayaan masyarakat di daerah Kecamatan Rimbo Ulu merupakan salah satu bagian integral untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Sendang Agung yang terus dilakukan dalam upaya-upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui berbagai pendekatan sesuai dengan strategi dan potensi dana desa maupun berbagai potensi yang dapat mendukung proses pembangunan sesuai kebutuhan dan manfaat perekonomian masyarakat.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan

dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Hidayat et al., 2020).

Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa. Dana Desa dimaksudkan sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan dalam masyarakat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Rimbo Ulu berpenghasilan sebagai petani apabila ditopang dengan biaya pemberdayaan masyarakat maka secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah oleh BUM Desa dimaksudkan bukan hanya menjadi penggerak roda-roda prekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa.

Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara profesional, sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai, data anggaran dana desa di Kecamatan Sendang Agung dimasukkan ke dalam bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, salah satu tujuan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah pengentasan Kemiskinan, akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit diselesaikan. Berikut tabel Dana Desa di Kecamatan Sendang Agung: Dana Desa di Kecamatan Sendang Agung masih fluktuatif meningkat sedangkan pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Sendang Agung untuk program pengentasan kemiskinan semakin meningkat dan sulit untuk diselesaikan maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.(Danandjaja, 2014)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah untuk diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program desa(Sa'diyah, 2019). Dalam mengoptimalkan potensi di Kecamatan Sendang Agung, Pemerintah daerah menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan dll.

Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung pembangunan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kecamatan Sendang Agung yang mewujudkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan. dan menurut penelitian Diana Nawati Wijaya, Zainal Arifin, Syamsul Hadi terdapat berpengaruh dalam penelitian sedangkan menurut teori kesejahteraan ekonomi akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintahan maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo).

## **Landasan Teori**

Menuliskan konseptual berdasarkan teori-teori ataupun penemuan-penemuan riset sebelumnya. Konseptual ini digunakan untuk menuntun peneliti pada fokus masalah penelitian sekaligus “menjamin” penelitian tidak keluar dari konteksnya.

## **Metodologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif (Sari et al., 2022). Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random (Agustianti et al., 2022). Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono & Lestari, 2021).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Kecamatan Sendang Agung**

Kabupaten Sendang Agung merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk akibat pemekaran wilayah di tahun 1999, hal ini sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 135/2465/Pem Tahun 1999 memprogramkan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II. Seiring diterbitkannya surat Gubernur Jambi tersebut maka berlangsunglah pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Bupati Bungo Drs. H. Sofian Ali, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sendang Agung Nomor 669 Tahun 1999 tentang Tim Pelaksanaan Penerapan Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Bungo Tebo.

Keputusan tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Daerah Sendang Agung Nomor 170/271/1999 tanggal 21 Mei 1999, maka

pada tanggal 12 Oktober 1999 resmi terbentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tebo. Pada akhir tahun 2020, kabupaten Sendang Agung memiliki jumlah penduduk sebanyak 356.875 jiwa. Seperti kebanyakan Kabupaten yang ada di Jambi, Tebo juga memiliki semboyan yaitu “seentak galah serenggkuh dayung” yang artinya kebersamaan dan kekompakan dalam upaya memacu dan mendukung program pembangunan.

Hal ini diiringi dengan komitmen bahwa seluruh lapisan masyarakat seiring sejalan dalam upaya mewujudkan kabupaten Sendang Agung yang aman, sejahtera, makmur, adil dan merata Kabupaten Sendang Agung terdiri dari 12 Kecamatan yang salah satunya adalah Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ulu terletak antara  $120^{\circ} 51' \text{ s/d } 125^{\circ} 51' \text{ Lintang Selatan}$  dan  $110^{\circ} 51' \text{ s/d } 110^{\circ} 55' \text{ Bujur Timur}$  dengan luas wilayah 291,83 KM dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 90-175 meter. Kecamatan Sendang Agung adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Sendang Agung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor: 02 Tahun 2003. Kecamatan Sendang Agung dengan Ibukota Kecamatan di Suka Damai. Tabel 4 Luas Kecamatan Sendang Agung Berdasarkan Jumlah Desa / Kelurahan Tahun 2024

## **2. Pengaruh Secara Parsial Jumlah Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Kecamatan Sendang Agung**

Pembahasan pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung dari tahun 2015 hingga 2018 yang diolah menggunakan program SPSS 25 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi  $X_1$  (dana desa) sebesar 0,973 artinya jika jumlah dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami meningkat sebesar 0,973. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif antara dana desa

dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel dana desa (X1) mempunyai t hitung yakni 0,655 dan nilai signifikan sebesar 0,518. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,518 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa dana desa berjalan sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Sendang Agung sudah dijalankan sesuai prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sehingga dalam pengelolaan program dana desa selalu memadai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dana desa efektif untuk pemberdayaan masyarakat desa. sebagian besar dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan bantuan blt dll dan melalui program padat karya yaitu seperti pembangunan infrastruktur desa, karena padat karya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat desa, sebab pembangunan infrastruktur desa dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat akan mempengaruhi sumber daya manusia lokal desa, sumber daya alam masing-masing desa, menggunakan bahan bahan baku dari desa, sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan manfaat dana desa pun kurang dirasakan semua masyarakat di Kecamatan Sendang Agung.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekretraris desa Sukamaju Kecamatan Sendang Agung yaitu Bapak Supri mengatakan pendapat yakni: Dalam pengelolaan dana desa itu pihak kantor desa harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti contoh pada desa sukamaju itu bermayoritas berternak hewan peliharaan seperti sapi dan kambing dengan demikian pihak desa akan memberikan bantuan hewan ternak seperti sapi pada setiap RT dan Mudin (Imam pengurus Masjid) sehingga masyarakat akan mengalami kenaikan ekonomi pendapatan dari dana desa yaitu dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Narto salah seorang warga di Desa Suka Maju beliau mengatakan hal yang sama, dimana penggunaan dana desa di Kecamatan Rimbo Ulu digunakan untuk membangun infrastruktur, sedangkan untuk yang bersifat pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan potensi ekonomi lokal masih terbilang sangat minim.

Penggunaan dana desa di Kecamatan Rimbo Ulu terlihat hanya untuk pembangunan fisik saja seperti taman, gor dll yang tentunya itu kurang efektif bagi kebutuhan masyarakat, seharusnya pemerintah desa juga harus mengalokasikan dana desa tersebut ke bidang pemberdayaan masyarakat yang bersifat mengembangkan potensi-potensi ekonomi agar bisa menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana desa sudah berjalan sesuai tujuan dari peraturan pemerintah yaitu meningkatkan pembangunan desa melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur desa, sehingga kurang efektif apa yang dibutuhkan masyarakat pada program padat karya tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa sebab pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa dan sumber daya alam desa, sehingga dana

desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan manfaat dana desa pun kurang bisa dirasakan semua masyarakat sehingga tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

Menurut pendapat masyarakat tentang dana desa yaitu kurang efektif menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan masih terbilang kecil, padahal banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi desa yang dapat didorong untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, seperti budidaya ikan tawar, pembuatan batu bata bolong, pembuatan genteng dll.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian secara parsial variabel jumlah dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka tidak mempengaruhi kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, sehingga tidak terdapat kesesuaian dengan tujuan PP Nomor 60 Tahun 2014 meskipun program dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 2007. Sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa jumlah dana desa tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.

2. Hasil penelitian secara parsial variabel alokasi alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran pengalokasian alokasi dana desa di Kecamatan Sendang Agung dan penggunaan alokasi dana desa tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat masih sangat minim dan tidak terdapat kesesuaian dengan tujuan dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.
3. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Secara bersama – sama tidak memiliki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 53% sedangkan 47% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. Maka tidak terdapat kesesuaian dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

### **Ucapan terima kasih**

Peneliti mengucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung atas penelitian ini.

### **Referensi**

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikham, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*.
- Ferdiyono, J. R., & Santoso, D. (2018). Pengaruh Remunerasi, Kepuasan Kerja Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Organizational Citizen Behavior Sebagai Variabel Intervening Pada Seksi Bpkb Ditlantas Polda Jateng. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 240.

- <https://doi.org/10.26623/jreb.v11i3.1145>
- Hidayat, T., Tanjung, H., & Juliandi, A. (2020). Motivasi Kerja, Budaya Organisasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Guru Pada SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 189. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2363>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Jusmaliani, M. E. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Bumi Aksara.
- Sa'diyah, H. (2019). Implementasi Manajemen Kepala Madrasah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin Desa Sidoharjo Jati Agung Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 9-25.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Warisno, A. (2021). *JPdK Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 197-206 JURNAL PENDIDIKAN dan KONSELING Research & Learning in Primary Education Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik Melalui Implementasi Perencanaan Strategis Disekolah Menengah Pertama*. 3.
- Yusma Lukman Yasin, Muslihun, N. H. (2019). Analisis Dampak Tingkat Pendapatan dan Perilaku Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 224(11), 122-130.